



ECONUSA
NATURE • CULTURE • CONSERVATION

STUDI PEREDARAN DAN RANTAI PASOK KAYU DARI PAPUA - MALUKU

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| I. Latar Belakang | 1 |
| II. Metodologi | 1 |
| III. Ruang Lingkup Studi | 2 |
| IV. Potret Kondisi Hutan Papua dan Maluku | 3 |
| V. Perusahaan Kayu (HPH dan HTI) dan Produksi Kayu di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku | 4 |
| VI. Industri Pengolahan Kayu (IPHHK) dan Konsumsi Bahan Baku Kayu di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku | 10 |
| VII. Peredaran Kayu di & dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku | 13 |

I. Latar Belakang

Yayasan Econusa merupakan salah satu mitra pembangunan di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku. Yayasan Econusa bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk peningkatan tata kelola sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan, melalui pendekatan perencanaan pembangunan Rendah Karbon yang disinergikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung inisiatif ini adalah melakukan kajian untuk menelusuri peredaran dan rantai pasok kayu ke industri kayu dan *pulp* yang bersumber dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku. Kegiatan ini diharapkan akan memberikan gambaran terkait pemanfaatan, penjualan dan peredaran kayu sehingga mampu mengidentifikasi potensi ancaman terhadap keberadaan hutan alam tersisa di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku.

Walaupun pemerintah telah memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai bentuk pengendalian terhadap praktik penebangan dan peredaran kayu ilegal, namun tidak dapat dipungkiri bahwa praktik-praktik *illegal logging* masih terjadi di hutan-hutan alam di Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan terjadi juga di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku yang masih memiliki tutupan hutan alam sekitar 81% dan 57% luas daratannya (FWI, 2019)¹.

II. Metodologi

Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka (*desk analysis*) dengan melakukan penelusuran data dan informasi sekunder tentang peredaran kayu dan rantai pasok ke industri kayu dan *pulp* yang bersumber dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku. Data dan informasi yang dikumpulkan dari sumber informasi yang bisa diakses oleh publik, yang tersedia di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga lainnya yang terkait. Beberapa sumber informasi seperti dokumen studi, situs perusahaan, situs KLHK, dokumen yang dipublikasi oleh perusahaan, dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri, dokumen-dokumen publik lainnya. Selain itu, proses pengumpulan data dilakukan dengan pembelian data di Kementerian Hukum dan HAM terkait data kepemilikan perusahaan (akta notaris).

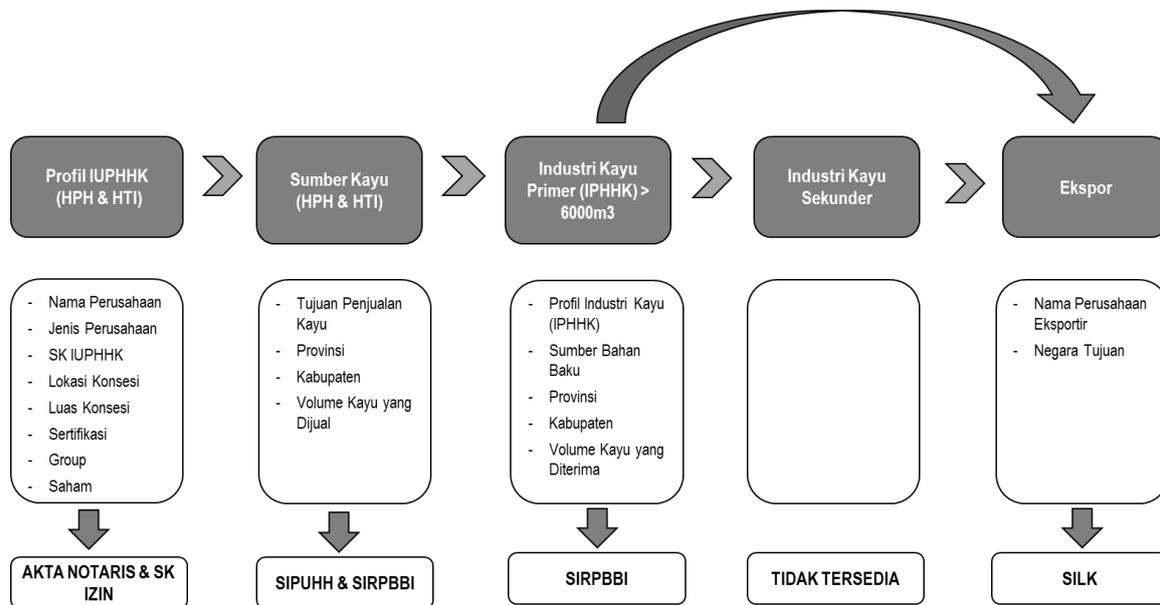
Informasi yang sudah terkumpul, kemudian akan diolah dengan menggunakan tabulasi sebagai database sederhana untuk mempermudah dalam melakukan analisis data. Setidaknya informasi yang akan diolah, diantaranya: nama perusahaan, jenis perusahaan, SK perusahaan, luas konsesi, lokasi konsesi (kabupaten dan provinsi), jenis sertifikasi yang dimiliki, tujuan penjualan kayu (nama perusahaan industri, lokasi, rencana dan realisasi penjualan kayu, tahun), dan termasuk group, pemilik perusahaan, dan pemodal. Peneliti juga melakukan serangkaian wawancara untuk melakukan verifikasi data yang telah dikumpulkan dan sekaligus untuk melengkapi pengumpulan data dan informasi yang masih diperlukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Setelah data-data tersebut diolah, maka selanjutnya akan dianalisis sebagai bahan penyusunan laporan studi tentang peredaran kayu dan rantai pasok ke industri kayu dan *pulp* dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku yang diperdagangkan dan dibeli oleh para konsumen di pasar internasional.

¹ FWI. 2019. Lembar Fakta: Angka Deforestasi sebagai 'Alarm' Memburuknya Hutan Indonesia. Bogor

III. Ruang Lingkup Studi

Studi peredaran dan rantai pasok kayu ke industri kayu dan *pulp* ini, akan mengumpulkan dan mengolah data-data mengenai: perusahaan kayu sebagai pemasok kayu, industri kayu dan *pulp* sebagai penerima (pengonsumsi) bahan baku kayu yang berasal dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku, sampai kepada industri sekunder atau para konsumen sebagai pembeli produk kayu di pasar internasional.



Gambar 1. Pengumpulan dan pengolahan data terkait peredaran kayu dan rantai pasok ke industri kayu dan ekspor

Studi ini akan dimulai dengan menyusun database sederhana (dalam bentuk excel) terkait tentang alur peredaran kayu dari perusahaan kayu ke industri kayu dan *pulp* yang berada di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku dengan mengumpulkan data-data yang tersedia dalam rentang tahun 2018 – 2019. Karena keterbatasan data dan informasi yang tersedia, maka studi lebih memfokuskan pada peredaran kayu yang diproduksi oleh perusahaan HPH & HTI dan dikonsumsi oleh industri kayu primer (IPHHK) dengan kapasitas di atas 6.000 m³.

Database ini menyimpan data dan informasi tentang perusahaan HPH dan HTI yang defenitif yang berada di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pemasok bahan baku kayu ke industri kayu dan *pulp*. Jenis informasi yang dikumpulkan dan diolah terkait profil perusahaan, sertifikasi yang dimiliki, group dan kepemilikan perusahaan yang akan diperoleh dari Akta Notaris Perusahaan.

Database ini diperkaya dengan informasi tentang volume penjualan kayu oleh perusahaan kayu (HPH & HTI) dan dikonsumsi industri kayu dan *pulp* yang berada dan di luar wilayah Tanah Papua dan Kepulauan Maluku. Termasuk informasi para konsumen di pasar internasional yang membeli produk kayu bersumber dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku. Studi ini juga akan membangun database sederhana terkait industri kayu dan pulp yang beroperasi di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku. Termasuk informasi terkait perusahaan yang menjadi pemasok bahan baku (BB) kayu bagi industri kayu dan *pulp*.

Selain tersedianya database, output yang akan dihasilkan dari studi ini adalah laporan naratif yang membahas peredaran kayu dari HPH & HTI dan rantai pasok ke industri kayu dan *pulp* dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku yang diperdagangkan per group perusahaan kayu.

IV. Potret Kondisi Hutan Papua dan Maluku

Hasil analisis yang dilakukan oleh FWI pada tahun 2017 menunjukkan bahwa luas hutan alam yang tersisa di seluruh Indonesia sekitar 82,8 juta hektare. Khususnya untuk region Papua diperkirakan sebesar 33,1 juta hektar dan region Maluku masih memiliki hutan alam sebesar 4,5 juta ha. Sedangkan bila dibandingkan dengan luas daratannya, maka Region Papua dan Maluku memiliki persentase tutupan hutan alam seluas 81% dan 57%² dari total daratannya.

Namun, saat ini tren kerusakan hutan alam di Indonesia telah bergerak ke wilayah timur akibat semakin habisnya hutan alam tersisa di bagian Barat dan Tengah wilayah Indonesia. Tanah Papua dan Kepulauan Maluku, yang masih memiliki hutan alam yang luas, sudah pasti akan menghadapi ancaman kehancuran sumber daya tersebut. Wujud ancaman ini telah semakin nyata dengan masifnya pembangunan infrastruktur untuk mobilisasi komoditas hasil hutan dan sumber daya alam lainnya dari industri-industri ekstraktif berbasis lahan.

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia secara umum disebabkan sistem kebijakan politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan bagi kepentingan politik dan keuntungan pribadi (FWI/ GFW, 2001).

Tabel 1. Luas dan Laju Deforestasi Region Maluku dan Papua Periode 2013-2017

| Region | Tutupan Hutan Alam 2017 | Deforestasi Hutan Alam 2013-2017 | Deforestasi rata-rata per tahun 2017 |
|-----------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Maluku | 4.515.417 | 543.566 | 141.738 |
| Papua | 33.119.514 | 692.107 | 174.371 |
| Indonesia | 82.832.498 | 5.723.787 | 1.466.999 |

Sumber: FWI. 2019. Lembar Fakta: Angka Deforestasi sebagai ‘Alarm’ Memburuknya Hutan Indonesia

Pada Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa periode tahun 2013 - 2017, luas deforestasi hutan alam di region Maluku dan Papua, seluas 543 ribu hektare dan 692 ribu hektare. Sedangkan laju deforestasi di kedua region ini, untuk Maluku seluas 141 ribu hektare per tahun dan region Papua seluas 174 ribu hektare.

² FWI. 2019. Lembar Fakta: Angka Deforestasi sebagai ‘Alarm’ Memburuknya Hutan Indonesia. Bogor

V. Perusahaan Kayu (HPH dan HTI) dan Produksi Kayu di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku

Perkembangan industri perindustri kayu, di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku, tidak bisa dilepaskan dari kegiatan perusahaan hutan alam. Kegiatan perusahaan hutan alam tersebut diwujudkan melalui Hak Perusahaan Hutan (HPH), yang lebih bersifat mengeksploitasi sumber daya kayu (*timber extraction*). Kemudian perusahaan hutan lebih diarahkan kepada usaha-usaha pemanfaatan sumber daya hutan (*forest resource utilization*) melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Artinya secara umum industri perindustri kayu di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku masih didominasi oleh kegiatan menebang kayu (*logging*) yang memproduksi kayu bulat. Bila dilihat dari sisi ekonomi industri, perkembangan industri perindustri kayu di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku, belum bisa memberikan nilai tambah (*added value*) yang signifikan kepada daerah ini.

Pada buku Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, jumlah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA/HPH) di tanah Papua sebanyak 38-unit manajemen dengan total luas konsesi sekitar 5,481 juta hektare³, dengan rincian 21-unit manajemen dengan luas kurang lebih 2,978 juta hektare di Provinsi Papua Barat dan 17-unit manajemen dengan luas kurang lebih 2,503 juta hektare di Provinsi Papua. Sedangkan jumlah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman (IUPHHK-HT/HTI) di Tanah Papua, sebanyak 9-unit manajemen yang memiliki konsesi seluas 998,6 ribu hektare. Di provinsi Papua Barat terdapat 8-unit manajemen yang luasnya sekitar 898,6 ribu hektare dan di Provinsi Papua hanya ada satu unit manajemen dengan luas 99,9 ribu hektare.

Sebaran pemegang izin HPH di Kepulauan Maluku sebanyak 26-unit manajemen dengan luas sekitar 1,687 juta hektare. Di Provinsi Maluku terdapat 13-unit manajemen dengan luas 717,67 ribu hektare dan Provinsi Maluku Utara ada 13-unit manajemen dengan luas sekitar 670 ribu hektare. Pemegang izin HTI yang ada di Kepulauan Maluku, sebanyak 7-unit manajemen dengan luas sekitar 132,1 ribu hektare. Untuk Provinsi Maluku, ada 2-unit manajemen yang luasnya 66,2 ribu hektare dan Provinsi Maluku Utara terdapat 5-unit manajemen dengan luas 65,9 ribu hektare.

Sedangkan berdasarkan data dari Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari – KLHK pada tahun 2018, jumlah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA/HPH) di tanah Papua sebanyak 40-unit manajemen dengan total luas konsesi sekitar 5,664 juta hektare. jumlah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman (IUPHHK-HT/HTI) di Tanah Papua, sebanyak 9-unit manajemen yang memiliki konsesi seluas 998,6 ribu hektare.

³ KLHK. 2019. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

Sedangkan berdasarkan data dari Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari – KLHK pada tahun 2018, jumlah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA/HPH) di tanah Papua sebanyak 40-unit manajemen dengan total luas konsesi sekitar 5,664 juta hektare. jumlah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman (IUPHHK-HT/HTI) di Tanah Papua, sebanyak 8-unit manajemen yang memiliki konsesi seluas 791,8 ribu hektare. Sebaran pemegang ijin HPH di Kepulauan Maluku sebanyak 26-unit manajemen dengan luas sekitar 1,391 juta hektare. Sedangkan pemegang izin HTI yang ada di Kepulauan Maluku, sebanyak 5-unit manajemen dengan luas sekitar 132,1 ribu hektare.

Tabel berikut ini merupakan profil perusahaan-perusahaan HPH dan HTI di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku, yang diolah dari berbagai sumber data.

Tabel 2. Profil Perusahaan HPH Tanah Papua dan Kepulauan Maluku

| No. | NAMA IUPHHK-HA | GROUP | SAHAM MAYORITAS | SK IUPHHK-HA | | LUAS (Ha) | KABUPATEN | SERTIFIKAT | | LS |
|--------------|---|----------------------|--|---|--|------------------|----------------------|------------|-----|--------------------|
| | | | | SK | Tgl. | | | PHPL | VLK | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Papua | | | | | | | | | | |
| 1 | Bina Balantak Utama, PT | Kayu Lapis Indonesia | ANUGERAH SEJAHTERA BERUMPAH, PT | 365/Menhut-II/2011 | 07 Juli 2011 | 298,710 | Sarmi | PHPL | | Global Resources |
| 2 | Damai Setiatama Timber, PT | | ANUGRAH SENTOSA LESTARI, PT FOREST A SENTOSA RAYA, PT | SK.565/Menhut-II/2013 | 16 Agustus 2013 | 315,475 | Boven Digoel & Mappi | PHPL | | Ayamuru |
| 3 | Diadyani Timber, PT | Kayu Lapis Indonesia | ABADI SINAR PELANGI, PT | 292/Menhut-II/09 | 18 Mei 2009 | 190,000 | Mimika | PHPL | | TUV |
| 4 | Hanurata Unit Jayapura, PT | Hanurata | YAYASAN BANTUAN BEASISWA YATIM PIATU TRI KOMANDO BAKYAT YAYASAN HARAPAN KITA | 601/Menhut-II/2012 | 30 Oktober 2012 | 56,325 | Keerom | PHPL | VLK | Trustindo Lambodja |
| 5 | Inocin Abadi (d/h PT. Inocin Kalimantan), PT | Korindo | PELAYARAN KORINDO | 606/Menhut-II/2011 | 21 Oktober 2011 | 99,665 | Merauke | PHPL | | Equality |
| 6 | Ima Sulindo (Unit II), PT *) | | | 04/Kpts-II/01 | 11 Januari 2001 | 104,192 | Waropen | | VLK | MIMS |
| 7 | Jati Dharmalndah Plywood Industries, PT | SinarWijaya | YAPEN WAROPEN, PT SINAR WIJAYA PLYWOOD INDUSTRIES, PT | 69/Kpts-I/97; 8/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 | 31 Januari 1997; 21 Juni 2016 | 207,410 | Nabire | PHPL | | Transtra |
| 8 | Mondialindo Setya Pratama, PT | | DAYA OPTA KARYA SEMPURNA, PT | 466/Menhut-II/06 | 19 September 2006 | 94,800 | Sarmi | PHPL | | Sarbi |
| 9 | Mukti Artha Yoga, PT | | ANUGRAH SENTOSA LESTARI, PT FOREST A SENTOSA RAYA, PT | 57/Menhut-II/07 | 22 Februari 2007 | 151,690 | Mappi & Boven Digoel | | | |
| 10 | Mutiara Alas Khabulistiwa, PT | Masindo | BAGUS JAYA ABADI, PT | 676/Menhut-II/2014 | 12 Agustus 2014 | 81,855 | Mimika & Dogyai | | VLK | Intishar |
| 11 | Papua Hutan Lestari Makmur, PT | | ABDURACHMAN ABDULKADIR ASSEGAF | 334/Menhut-II/09 | 15 Juni 2009 | 108,510 | Jayapura | PHPL | | Stranstra |
| 12 | Prabu Alaska Unit II, PT | Prabu Alaska | ALAMINDO LESTARI SEJAHTERA, PT | 15/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 | 19 September 2016 | 6,435 | Boven Digoel | | | |
| 13 | Salaki Mandiri Sejahtera, PT | Wapoga | SUSAN LIUANTI SUNARTI | 396/Menhut-II/06 | 17 Juli 2006 | 79,130 | Sarmi | PHPL | | IIMS |
| 14 | Semarak Dhama Timber, PT | Patria | JEMMY TAMSTIL, CHARLES TAMSTIL, FERRY TAMSTIL | 287/Menhut-II/2014 | 20 Maret 2014 | 164,180 | Keerom | | VLK | Ayamuru |
| 15 | Sumber Mitra Jaya, PT | Mitra Jaya | | 396/Menhut-II/05 | 23 November 2005 | 102,250 | Jayapura & Sarmi | | | |
| 15 | Sumber Mitra Jaya, PT | Mitra Jaya | | 556/Menhut-II/06 | 22 Desember 2006 | 52,160 | Sarmi | | | |
| 16 | Tunas Timber Lestari, PT (d.h. PT. Tunas Sawaema) | Korindo | PELAYARAN KORINDO | 101/Menhut-II/09 | 02 Desember 2009 | 214,935 | Boven Digoel | PHPL | | Ayamuru |
| 17 | Batasan, PT | Batasan | TANTJIN KOK | SK.416/Menhut-II/04 | 19 Oktober 2004 | 49,150 | Keerom | | VLK | BVM |
| 18 | Global Partners Indonesia, PT | | BARAMEGA PERSADA INVESTAMA, PT | SK.39/Menhut-II/2009 | 09 Februari 2009 | 144,940 | Asmat | | | |
| 19 | Wapoga Mutiara Timber Unit II, PT | Wapoga | SUSAN LIUANTI SUNARTI | 744/Kpts-II/90; SK.723/Menhut-II/2011; SK.625/Menhut-II/2012 | 13 Desember 1990; 20 Desember 2011; 7 November 2012 | 169,170 | Sarmi & Jayapura | PHPL | | IIMS |
| 19 | Jumlah | | | | | 2,685,992 | | | | |

| No. | NAMA IUPHHK-HA | GROUP | SAHAM MAYORITAS | SK IUPHHK-HA | | LUAS [Ha] | KABUPATEN | SERTIFIKAT | | IS |
|-----|--|---|---|--|--|-----------|--------------------------|------------|-----|------------|
| | | | | SK. | Tgl. | | | PHPL | VLK | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Papua | | | | | | | | | |
| | Papua Barat | | | | | | | | | |
| 1 | Arfak Indra, PT | Mega Masindo | HERU BUDIYONO | 333/Menhut-II/2009 | 15 Juni 2009 | 177,900 | Fak-Fak | PHPL | | Ayamaru |
| 2 | Asco Prima Nusantara, PT | | ABDURACHMAN ABDULKADIR ASSEGAF | 82/Menhut-II/2009 | 05 Maret 2009 | 171,270 | Kaimana | PHPL | | IMS |
| 3 | Bangun Kayu Irian, PT | PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) | PT ANUGERAH PERSADA SUBUR | 623/Menhut-II/2014 | 14 Juli 2014 | 139,970 | Sorong Selatan & Maybrat | | | |
| 4 | Bintuni Utama Mumi W. Industries, PT | | RAFUS | 213/Menhut-II/07 | 28 Mei 2007 | 82,120 | Teluk Bintuni | PHPL | VLK | Sarbi |
| 5 | Hanurata, PT | Hanurata | YAYASAN BANTUAN BEASISWA YATIM PIATU TRI KOMANDO RAKYAT YAYASAN HARAPAN KITA | 859/Menhut-II/2014 | 29 September 2014 | 234,470 | Fakfak & Kaimana | PHPL | | Trustindo |
| 6 | Ima Sulindo (Unit II), PT * | | | 04/Kpts-II/01 | 11 Januari 2001 | 70,348 | Kaimana | | VLK | Ayamaru |
| 7 | Kaltim Utama, PT | Sinar Wijaya | SINAR WIJAYA PLYWOOD INDUSTRIES, PT | 652/Menhut-II/09 | 15 Oktober 2009 | 161,670 | Kaimana | | VLK | IMS |
| 8 | Kurniatama Sejahtera, PT | Arta Graha | | 648/Menhut-II/09 | 15 Oktober 2009 | 115,800 | Teluk Wondama | PHPL | | IMS |
| 9 | Mancaraya Agro Mandiri, PT | | ANDRY WIDJAJA, IRWAN WIDJAJA, TONNY WIDJAJA | 55/Menhut-II/06 | 14 Maret 2006 | 97,820 | Sorong | PHPL | | Sarbi |
| 10 | Manokwari Mandiri Lestari, PT | | BINTUNI MUJIA SAKTI, PT | 366/Menhut-II/11 | 07 Juli 2011 | 90,980 | Teluk Bintuni | PHPL | | Equality |
| 11 | Megapura Mambramo Bangun, PT | | | 397/Menhut-II/06 | 17 Juli 2006 | 55,100 | Manokwari | PHPL | | Lambodja |
| 12 | Mitra Pembangunan Global, PT | PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) | | 714/Menhut-II/09 | 19 Oktober 2009 | 83,950 | Sorong Selatan | PHPL | | Garda |
| 13 | Multi Wahana Wijaya, PT | | | 159/Menhut-II/2011 | 31 Maret 2011 | 107,740 | Sorong | PHPL | | Ayamaru |
| 14 | Papua Satya Kencana, PT | Arta Graha | | 647/Menhut-II/09 | 15 Oktober 2009 | 195,420 | Teluk Bintuni | PHPL | | Mutuungung |
| 15 | Prabu Alaska Unit I, PT | Prabu Alaska | | 15/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 | 19 September 2016 | 322,780 | Fakfak | | VLK | Intishar |
| 16 | Rimba Kayu Arthamas | Prabu Alaska | | 16/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 | 21 September 2016 | 130,400 | Teluk Bintuni | | VLK | Intishar |
| 17 | Teluk Bintuni Mina Agro Karya, PT | Djajanti | | 509/Menhut-II/2012 | 13 September 2012 | 237,750 | Teluk Bintuni & Kaimana | PHPL | | Lambodja |
| 18 | Wanagalang Utama, PT | Kalimanis | | 6/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015 | 13 Juli 2015 | 132,850 | Teluk Bintuni | | VLK | Garda |
| 19 | Wijaya Sentosa, PT (d.h. PT. Wapoga Mutiara Timber Unit I) | Sinar Wijaya | | SK.723/Menhut-II/2011 jo. SK.624/Menhut-II/2012 jo. SK.33/Menhut-II/2013 | 20 Desember 2011 jo. 7 November 2012 jo. 15 Januari 2013 | 130,755 | Teluk Wondama | PHPL | | TUV |
| 20 | Wukirasari, PT | Sinar Wijaya | | 477/Menhut-II/08 | 31 Desember 2008 | 116,320 | Teluk Bintuni | PHPL | | Sarbi |
| 21 | Yotefa Sarana Timber, PT | Kayu Lapis Indonesia | | 570/Menhut-II/2011 | 03 Oktober 2011 | 123,565 | Teluk Bintuni | PHPL | | TUV |
| 21 | | | Jumlah | | | 2,978,978 | | | | |

| No. | NAMA IUPHHK-HA | GROUP | SAHAM MAYORITAS | SK IUPHHK-HA | | LUAS (Ha) | KABUPATEN | SERTIFIKAT | | LS |
|-----|--|----------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----|--------------------|
| | | | | SK. | Tgl. | | | PHPL | VLK | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Maluku | | | | | | | | | |
| 1 | Albasi Priangan Lestari, PT | | DENNY WIJAYA, SUTAR | 230/Menhut-II/11 | 20 April 2011 | 64,690 | Maluku Tengah | | VLK | Ayamuru |
| 2 | Bintang Lima Makmur, PT | | BUANA KRIDA ALAM SEJAHTERA, PT | 537/Menhut-II/2012 | 26 September 2012 | 24,550 | Maluku Tengah | PHPL | | Ganda |
| 3 | Gema Hutani Lestari, PT | | GEMA SANUBARI, PT | 951/Kpts-II/99 | 14 Oktober 1999 | 148,450 | Buru | PHPL | | Mutu Agung Lestari |
| | | | INHUTANI I, PT | | | | | | | |
| 4 | Karya Jaya Berdikari, PT | | SIK ROMMY WONGSO, KEVIN TOBING | 117/Menhut-II/2009 | 19 Maret 2009 | 93,980 | Maluku Tenggara Barat | PHPL | | Almasetra |
| 5 | Maluku Sentosa, PT | | SOEMTRO HARIYANTO, FERY TAMAYA | 522.11-72 Tahun 2001 & 377/Menhut-VI/2004 | 27 Agustus 2001 & 24 September 2004 | 12,600 | Buru | PHPL | | Ayamuru |
| 6 | Nusapadma Corp., PT | | RUSLI LOHETO | 94/Menhut-II/05 | 12 April 2005 | 39,920 | Buru | PHPL | | Sarbi |
| 7 | Panca Karya, PD | | | 117/Kpts-II/00 | 29 Desember 2000 | 63,440 | Buru Selatan | | | |
| | | | | 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 | 12 September 2017 | | Buru Selatan | | | |
| 8 | Reminal Utama Sakti, PT | | AMIR GAOS LATUCONSINA, AUREGA PUTRA | 720/Menhut-II/2013 | 25 Oktober 2013 | 32,385 | Buru Selatan | | VLK | Lambodja |
| 9 | Strata Pasific, PT | | BUANA KRIDA ALAM SEJAHTERA, PT | 774/Menhut-II/2013 | 8 November 2013 | 73,365 | Seram Bagian Timur | | VLK | Intisihar |
| 10 | Talikan Emas, PT | | BINTANGSANDITYA MIRTASAL, PT | 346/Menhut-II/08 | 22 September 2008 | 54,750 | Maluku Tengah | | VLK | Ganda |
| 11 | Wailo Wana Lestari, Koperasi | | | 522.11-53 | 08 Juni 2001 | 29,955 | Buru Selatan | | | |
| 12 | Wanapotensi Nusa, PT | | RINA TANNY, NUGROHO HENDARTO | 541/Kpts-II/1994; 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 | 24 November 1994; 9 Desember 2016 | 28,950 | | | VLK | Ayamuru |
| 13 | Wana Sejahtera Abadi, PT | | SAMANDITA ADI MAKMUR, PT | SK.426/Menhut-II/2012 | 06 Agustus 2012 | 54,560 | Kepulauan Aru | | | |
| 13 | | | Jumlah | | | 721,595 | | | | |
| | Maluku Utara | | | | | | | | | |
| 1 | Bela Berkat Anugrah, PT | BELA GROUP, PT | BELA GROUP, PT | 389/Menhut-II/06 | 12 Juli 2006 | 33,880 | Halmahera Selatan | PHPL | | Global Resource |
| | | | BENNY LAOS, | | | | | | | |
| 2 | Mohtra Agung Pesada, PT | | AFRIZEL, UPPERCO USAHA MAXIMA, PT | 400/Menhut-II/06 | 19 Juli 2006 | 50,940 | Halmahera Tengah | PHPL | | Lambodja |
| 3 | Mahakarya Agra Pesona, PT | | | 9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 | 10 Maret 2017 | 36,860 | Halmahera Timur | | VLK | BWI |
| 4 | Nusa Niwe Indah, PT | BELA GROUP, PT | BELA BERKAT ANUGERAH, PT | 410/Menhut-II/04 | 18 Oktober 2004 | 73,500 | Halbar-Halut | | | |
| 5 | Nusa Pala Nirwana, PT | | | 24/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 | 15 November 2016 | 28,892 | Halmahera Selatan | | | |
| 6 | Poleko Yubarsans Trading Coy, PT | | | 962/Kpts-II/99 | 14 Oktober 1999 | 86,599 | Halmahera Selatan | PHPL | | Ayamuru |
| 7 | Surya Kirana Dutamas, PT | | | 630/Menhut-II/2009 | 15 Oktober 2009 | 66,230 | Halmahera Selatan | | VLK | Muta Agung Lestari |
| 8 | TAIWI Unit I, PT | | | 368/Menhut-II/09 | 23 Juni 2009 | 73,375 | Halmahera Timur | | | |
| 9 | Telaga Bhakti Persada, PT | | | 372/Menhut-II/09 | 23 Juni 2009 | 63,405 | Halmahera Selatan | PHPL | | Global Resource |
| 10 | Tunas Pusaka Mandiri, PT (d.h. PT. Tunas Komalo Halmahera) | | | 351/Menhut-II/06 | 12 Mei 2006 | 24,430 | Halmahera Utara | | | |
| 11 | Wana Kencana Sejati Unit II, PT | | | 295/Menhut-II/07 | 28 Agustus 2007 | 45,825 | Halmahera Tengah | PHPL | | Sarbi |
| 12 | Wana Kencana Sejati, PT | | | 95/Menhut-II/05 | 12 April 2005 | 47,410 | Halmahera Timur | PHPL | | Sarbi |
| 13 | Wijaya Kencana Indonesia, PT | | | 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 | 18 Oktober 2016 | 38,695 | Halmahera Selatan | | VLK | Ganda |
| 13 | | | Jumlah | | | 670,041 | | | | |
| 26 | | | Total | | | 1,591,636.00 | | | | |

Tabel 3. Profil Perusahaan HTI Tanah Papua dan Kepulauan Maluku

| No. | NAMA IUPHHK-HT | GROUP | SAHAM MAYORITAS | SK IUPHHK-HT | | LUAS (Ha) | KABUPATEN | SERTIFIKAT | | LS |
|-----------------------------|--|---------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------|-----|----------|
| | | | | SK. | Tgl. | | | PHPL | VLK | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Provinsi Papua Barat | | | | | | | | | | |
| 1 | PT. Kesatuan Mas Abadi | | | SK. 818/Menhut-II/2014 | 25 September 2014 | 99,980 | Fak-Fak dan Teluk Bintuni | | | |
| 1 | Jumlah | | | | | 99,980 | | | | |
| Provinsi Papua | | | | | | | | | | |
| 1 | PT. Plasm a Nutfah Marind Papua | | | SK.648/Menhut-II/2011 | 14 November 2011 | 64,050 | Merauke | | | |
| 2 | PT. Selaras Inti Sem esta | | METRA DUTA LESTARI, PT | SK. 18/Menhut-II/2009 | 22 Januari 2009 | 169,400 | Merauke | | VLK | Equality |
| 3 | PT. W a h a n a Sam udra Sentosa | | WAHANA NUSANTARA PERKASA, PT WAWASAN DINAMIKA SEJAHTERA, PT | SK.880/Menhut-II/2014 | 29 September 2014 | 79,000 | Merauke | | | |
| 4 | PT. W an am ulia Sukses Sejati Unit I dan II | | DAVD HONORIS | 3/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2015 | 31 Maret 2015 | 112,245 | Merauke | | | |
| 5 | PT. Medcopapua Alam Lestari | | METRA DUTA LESTARI, PT | SK. 2/1/IUPHHK-HTI/PMA/2017 | 2 Mei 2017 | 68,300 | Merauke | | | |
| 6 | PT. W an am ulia Sukses Sejati Unit III | | | SK. 11/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2017 | 12 Juni 2017 | 99,100 | Merauke | | | |
| 7 | PT. Bade Makm ur Orrisa | Korindo | PELAYARAN KORINDO TRISETIA INTIGA, PT | SK. 16/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2017 | 09 November 2017 | 99,750 | Boven digoel | | | |
| 7 | Jumlah | | | | | 691,845 | | | | |
| | Total | | | | | 791,825.00 | | | | |
| No. | NAMA IUPHHK-HT | GROUP | SAHAM MAYORITAS | SK IUPHHK-HT | | LUAS (Ha) | KABUPATEN | SERTIFIKAT | | LS |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Provinsi Maluku | | | | | | | | | | |
| 1 | PT. Sentosa Pratama | | MITRA CIPTA PERMATA, PT | SK.677/Menhut-II/2011 | 06 Desember 2011 | 32,960 | Buru | | | |
| 2 | PT. Wainibe Wood Industries | | | SK.155/Menhut-II/2009 | 03 April 2009 | 33,245 | Buru | | VLK | Ayamuru |
| 2 | Jumlah | | | | | 66,205 | | | | |
| Provinsi Maluku | | | | | | | | | | |
| 1 | PT. Kalpika Wanatama Unit I | | SUMBER GRAHA MALUKU, PT | SK.612/Menhut-II/2009 | 15 Oktober 2009 | 11,780 | Kepulauan Sula | | | |
| 2 | PT. Kalpika Wanatama Unit II | | SUMBER GRAHA MALUKU, PT | 189/Kpts-II/1998 | 27 Februari 1998 | 11,242 | Kepulauan Sula | | | |
| 3 | PT. Kirana Cakrawala | | SUMBER GRAHA MALUKU, PT | SK No. 184/Kpts-II/1997 | 31 Maret 1997 | 21,265 | Halmahera Timur | | | |
| 4 | PT. Mangole Timber Producers | | SUMBER GRAHA MALUKU, PT | 191/Kpts-II/1998 | 27 Februari 1998 | 14,851 | Kepulauan Sula | | | |
| 5 | PT. NNE Plantation | | HAN SANG JAE, KONG SUKSOON | SK.312/Menhut-II/2011 | 15 Juni 2011 | 6,770 | Halmahera Utara | | | |
| 5 | Jumlah | | | | | 65,908 | | | | |
| | Total | | | | | 132,113.00 | | | | |

Produksi kayu bulat dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku diperoleh dari kegiatan penebangan dan pemanenan dari IUPHHK-HA (HPH), IUPHHK-HT(HTI), kayu-kayu IPK (izin pemanfaatan kayu) maupun izin sah lainnya. Namun studi ini tidak memperoleh informasi terkait jumlah kayu bulat yang dihasilkan dari kegiatan *land clearing* ini.

Bila mengacu pada informasi yang disajikan di dalam Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, maka produksi kayu bulat dari region Papua dan Maluku yang bersumber dari HPH dan HTI sebesar 1.207.905 m³. Untuk tahun 2018, produksi kayu bulat mengalami peningkatan menjadi 1.625.351 m³ yang semuanya bersumber dari hutan alam (Tabel 4).

Tabel 4. Produksi Kayu Bulat Region Maluku dan Papua Periode 2017-2018

| Provinsi | Produksi Kayu Bulat (2017) | | Produksi Kayu Bulat (2018) | |
|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | HPH (m ³) | HTI (m ³) | HPH (m ³) | HTI (m ³) |
| Maluku | 274.261 | - | 331.849 | - |
| Maluku Utara | 77.319 | 183 | 66.107 | - |
| Papua | 439.119 | - | 474.279 | - |
| Papua Barat | 417.206 | - | 753.116 | - |
| | 1.207.905 | 183 | 1.625.351 | - |

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

VI. Industri Pengolahan Kayu (IPHHK) dan Konsumsi Bahan Baku Kayu di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku

Sampai dengan tahun 2019, industri pengolahan kayu di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku masih didominasi oleh industri usaha primer hasil hutan kayu atau industri kayu (*primary wood processing*). Industri kayu ini atau disebut sebagai Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah industri yang mengolah kayu bulat (log) dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi⁴. IPHHK akan mengolah kayu bulat (log) menjadi barang setengah jadi atau bahan baku industri turunannya, seperti: kayu gergajian, kayu lapis, dan kayu serpih.

Informasi terkait jumlah IPHHK diperoleh dari Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (SI-RPBBI). Namun demikian pelaporan industri ke dalam SI-RPBBI hanya diwajibkan bagi pada industri pengolahan primer dengan kapasitas 2.000 - 6.000m³/tahun dan lebih dari 6.000m³/tahun.

Sedangkan untuk jumlah industri kayu yang memiliki kapasitas di bawah 2.000 m³ serta industri pengolahan sekunder (lanjutan) tidak tercakup di dalam SI-RPBBI maupun oleh platform pelaporan publik lainnya. Hal ini menyulitkan untuk mendokumentasikan seluruh jumlah industri kayu di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku.

⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan ini mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Namun demikian jumlah IPHHK yang tercatat oleh Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (SI-RPBBI) di KLHK, dapat dilihat pada Tabel 5. Di Tanah Papua, jumlah IPHHK yang memiliki kapasitas di atas 6000 m³ sebanyak 18 perusahaan dan ada satu (1) industri yang kapasitasnya di bawah 6000 m³. Sedangkan di Kepulauan Maluku, ada satu (1) industri kayu yang memiliki kapasitas di atas 6000 m³ dan 36 industri yang kapasitasnya di bawah 6000 m³

Tabel 5. Jumlah IPHHK dan Realisasi Bahan Baku Industri di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku Tahun 2018

| Provinsi | Jumlah IPHHK (unit) | | Realisasi Bahan Baku (m ³) | |
|--------------|-----------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | > 6000 m ³ | 2000 – 6000 m ³ | > 6000 m ³ | 2000 – 6000 m ³ |
| Maluku | 1 | 35 | 6.675 | 3.615 |
| Maluku Utara | 0 | 1 | 0 | 359 |
| Papua | 8 | 26 | 564.566 | 18.700 |
| Papua Barat | 10 | 14 | 207.414 | 34.582 |
| | 19 | 76 | 778.655 m ³ | 57.256 m ³ |

Sumber: Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (SI-RPBBI), 2019

Bila membandingkan antara volume produksi kayu bulat dari perusahaan HPH dan HTI (Tabel 4) dan kebutuhan bahan baku kayu bagi industri kayu primer (Tabel 5), maka dapat disimpulkan bahwa volume produksi kayu bulat yang tersedia, sudah mencukupi kebutuhan bahan baku bagi industri kayu beroperasi di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku. Namun faktanya tidak semua perusahaan HPH dan HTI yang menjual kayu bulat ke industri-industri yang ada di dua region ini, malah sebagian besar dijualnya kepada industri yang ada di luar region ini, terutama industri-industri kayu yang ada di region Jawa.

Pada skala nasional, berdasarkan hasil kajian terdahulu menemukan adanya kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan kayu bulat untuk dikonsumsi oleh industri pengolahan kayu, terutama untuk industri *pulp and paper*⁵. Kapasitas berlebihan dari industri pengolahan kayu di Indonesia dipercaya sebagai salah satu faktor masalah yang mendorong terjadinya pembalakan liar. Termasuk adanya permintaan kayu dari pasar gelap di dalam dan luar negeri yang mendorong permintaan akan kayu dan produk kayu illegal. Kondisi seperti ini pastinya akan mempengaruhi praktik-praktik pemanfaatan kayu di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku.

Berdasarkan data dan informasi yang tersedia di dalam SI-RPBBI periode tahun 2018-2019, profil industri kayu (IPHHK) dengan kapasitas di atas 6000 m³ yang aktif beroperasi di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku untuk mengolah kayu dari HPH dan HTI sebagai berikut:

⁵ Forest Trends. 2015. Indonesia's Legal Timber Supply Gap and Implications for Expansion of Milling Capacity; Hasil penelitian Koalisi Anti Mafia Kehutanan dan Forest Trends menemukan penggunaan kayu oleh perusahaan besar diduga masih dipasok dari sumber-sumber ilegal karena konsumsi lebih besar dari pasokan legal yang tercatat di Kementerian Kehutanan. Bahkan, tahun 2014 perbedaan mencapai 20 juta meter kubik (m³) atau lebih 30% (<https://www.mongabay.co.id/2015/02/24/riset-temukan-kayu-ilegal-opang-industri-menteri-siti-buka-bukaan-soal-pelaku/>)

Tabel 6. Profil Industri Kayu (> 6000 M³) yang Beroperasi di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku periode 2018-2019

| No. | Nama Industri Kayu (PHK) | GROUP | SAHAM MAYORITAS | SK IPHK | | PROVINSI | KABUPATEN | VLK | LS | Keterangan |
|-----|---|-----------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|-----------------------|--|
| | | | | SK | Tgl. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | UNI RAYA TIMBER, PT | | UNI RAYA TIMBER, PT | 918/MEN/TK/SETJEN/HPL0/10/2019 | 18 Oktober 2019 | Papua Barat | Sorong | VLK | BRIK | |
| 2 | RIMBA BINTUNI LESTARI, PT | Arta Graha | DAMAI OTRA LESTARI, PT | 536/129/XII/2017 | 18 Desember 2017 | Papua Barat | Teluk Bintuni | VLK | Sucofindo | |
| 3 | REKA WOOD, CV | | LOSO NUGROHO | 9Δ/1U/PHHK/PMDN/2018 | 14 Mei 2018 | Papua Barat | Sorong Selatan | Belum Ada | | Tidak ada pasokan kayu di RPBB 2018 & 2019 |
| 4 | HENRISON IRIANA, PT | Kayu Lapis Indonesia | | S.137/BPPHH-1/2009 | 17 Maret 2009 | Papua Barat | Sorong | VLK | Mutu HJau Indonesia | |
| 5 | HASTRA PASIRIK PAPUA, PT | | HDWPTE LTD | 442/Merhut-II/2008 | 27 November 2008 | Papua Barat | Teluk Bintuni | VLK | BRIK | Tidak ada pasokan kayu di RPBB 2018 & 2019 |
| 6 | HARTAWAN INDO TIMBER, PT | | HENDRA SUSILO | 10Δ/1U/PHHK/PMDN/2017 | 22 September 2017 | Papua Barat | Sorong | VLK | Mutu Agung Lestari | |
| 7 | BINTUNI UTAMA MURNI WOOD INDUSTRIES, PT | | RAFLIS | SK.4010/MENHUT-VT/BPPHH/2005 | 20 September 2005 | Papua Barat | Teluk Bintuni | VLK | Sarbi International | |
| 8 | BIAK VENEER JAYA, PT. | | CRISTINA SULAIMAN | 255/MENHUT-II/2007 | 06 Agustus 2007 | Papua Barat | Teluk Bintuni | VLK | Lamboja Sertifikasi | |
| 9 | BERAU KARYA INDAH, PT | | Mandikwari Mandiri Lestari, PT | SK.690/Merhut-II/2010 | 15 Desember 2010 | Papua Barat | Teluk Bintuni | VLK | Sucofindo | |
| 10 | BAGUS JAYA ABADI, PT | | Global Jaya Abadi Gemilang, PT & Pilar Sukses Segahtera, PT | 077.SVK.010-DND02.15 | 19 Maret 2009 | Papua Barat | Sorong | VLK | Trustindo Prima Karya | |
| 11 | ANUGERAH RIMBA PAPUA, CV | | | 6Δ/1U/PHHK/PMDN/2017 | 25 Juli 2017 | Papua Barat | Sorong | VLK | Garda Mutu Prima | |
| 12 | WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES, PT. | Wapoga | BAINES LIMITED | SK.4026/MENHUT-VI/BPPHH/2006 | 11 September 2006 | Papua | Biak Numfor | VLK | Equality Indonesia | |
| 13 | VICTORY CIVIL UNIT III, PT | | Yulius Lim, Adrianus | SK.13Δ/1U/PHHK-PL/PMDN/2017 | 08 April 2017 | Papua | Jayapura | VLK | Trustindo Prima Karya | |
| 14 | SINAR WIJAYA PLYWOOD INDUSTRIES, PT. | Sinar Wijaya | Sapto Jowo Wijoyo & Budi Susanto | 29Δ/1U/PHHK-PL/PMDN/2017 | 25 September 2017 | Papua | Yapen Waropen | VLK | BRIK | |
| 15 | SEMARAK DHARMA TIMBER, PT | | Fery Tamstil/Jemmy Tamstil | SK.137/Merhut-II/2013 | 01 Maret 2013 | Papua | Keerom | VLK | Ayamau | |
| 16 | PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR, PT | | Abdurrahman Assegaf | 19Δ/1U/PHHK-PL/PMDN/2015 | 14 Agustus 2015 | Papua | Jayapura | VLK | Trustindo Prima Karya | |
| 17 | MONDIALUNDO SETYA PRATAMA, PT (Eks PT. MSP) | | Hj Syahirifudin | SK.47/MENHUT-II/2011 | 22 Februari 2011 | Papua | Sarmi | VLK | Sarbi International | |
| 18 | KORINDO ABADI, PT | Korindo | Korindo Company HK, PT & Tunas Timber Lestari, PT | 375/Merhut-II/2010 | 24 Juni 2010 | Papua | Bovel Digoel | VLK | Mutu Agung Lestari | |
| 19 | CROWN PASIFIC ABADI, PT | | Fery Tamstil | 15Δ/1U/PHHK/PMDN/2017 | 17 Oktober 2017 | Papua | Keerom | Belum Ada | | |
| 20 | BIO INTI AGRINDO, PT | Daewood International | DAEWOOD INTERNATIONAL | SK.298/Merhut-II/2012 | 15 Mei 2012 | Papua | Merauke | VLK | SCS Global | |
| 21 | WAENIBE WOOD INDUSTRIES, PT. | | FERY TANAYAYA | S.79/M/BPPHH-2/2009 | 2/26/2009 | Maluku | Buru | VLK | Lamboja Sertifikasi | |

VII. Peredaran Kayu di & dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku

Penelusuran terhadap peredaran kayu dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk mengetahui kondisi pasokan dan kebutuhan bahan baku kayu bagi industri kayu. Semakin komprehensif dan rinci data yang dikumpulkan, maka semakin jelas gambaran pasokan kayu bulat dari berbagai sumber kayu (HPH, HTI, IPK dan izin sah lainnya), serta permintaan dari industri pengolahan kayu, baik primer maupun sekunder. Hasilnya jelas bermanfaat bagi pembenahan tata kelola sumber daya alam (hutan) di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku.

Kayu bulat yang diproduksi oleh perusahaan kayu (HPH dan HTI) dan izin sah lainnya, digunakan untuk bahan baku industri pengolahan kayu yang ada di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku sendiri. Namun sebagian kayu bulat tersebut akan didistribusikan ke luar, melalui penjualan/perdagangan antar pulau. Selain itu, produk setengah jadi (kayu gergajian) dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku, ada juga yang dijual kembali ke industri kayu primer, terutama kepada industri-industri kayu yang ada di Pulau Jawa, untuk diolah kembali menjadi berbagai macam produk akhir.

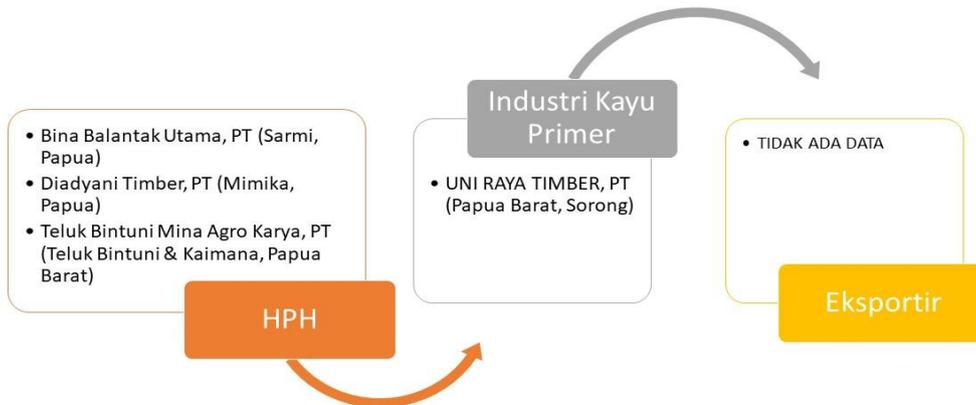
Peredaran Kayu di Tanah Papua & Kepulauan Maluku

Peredaran kayu ini akan menyajikan informasi tentang nama-nama industri kayu primer (kapasitas di atas 6000 m²) yang beroperasi di Tanah Papua dan Maluku (Tabel 5), yang sumber bahan baku kayunya dipasok oleh perusahaan HPH & HTI (termasuk dari izin sah lainnya) yang berada di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku (RPBBI, 2018-2019).

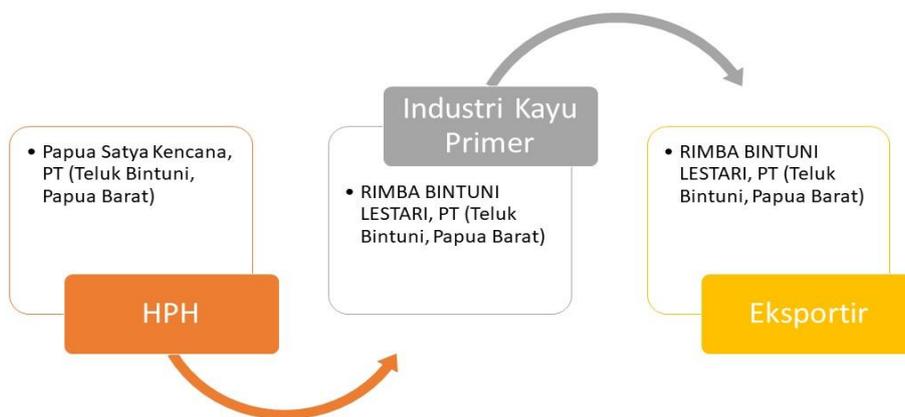
Di samping itu, informasi lain yang disajikan terkait nama-nama perusahaan eksportir yang menerima produk kayu dari industri primer yang ada di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku dan kemudian menjualnya ke pasar kayu internasional. Namun ada juga sebagian industri kayu primer yang menjual produk kayunya melalui perdagangan antar pulau, ke industri kayu primer yang ada di pulau Jawa, sebelum diekspor ke luar negeri.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari SILK, beberapa industri kayu yang beroperasi di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku, telah melakukan kegiatan ekspor secara mandiri.

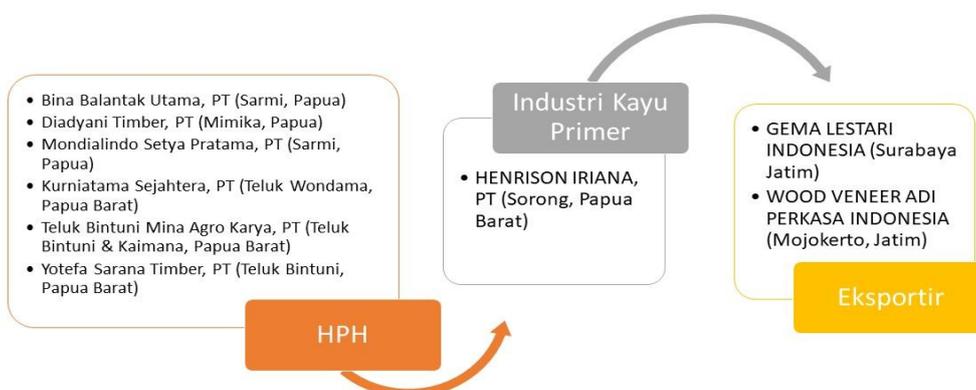
UNI RAYA TIMBER, PT



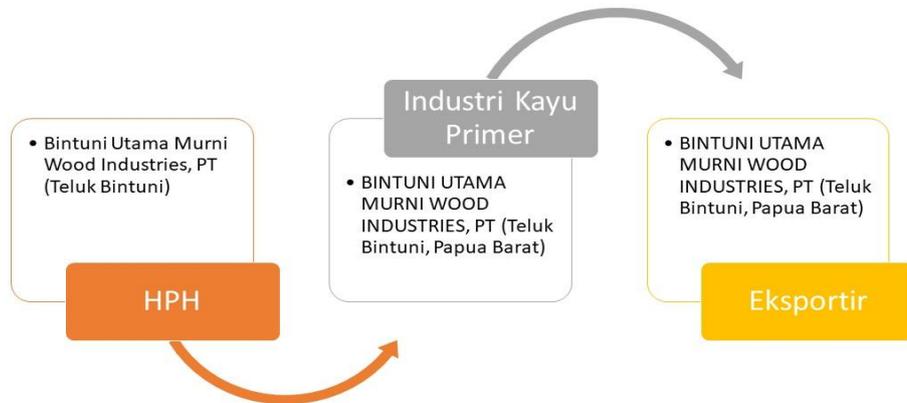
RIMBA BINTUNI LESTARI, PT



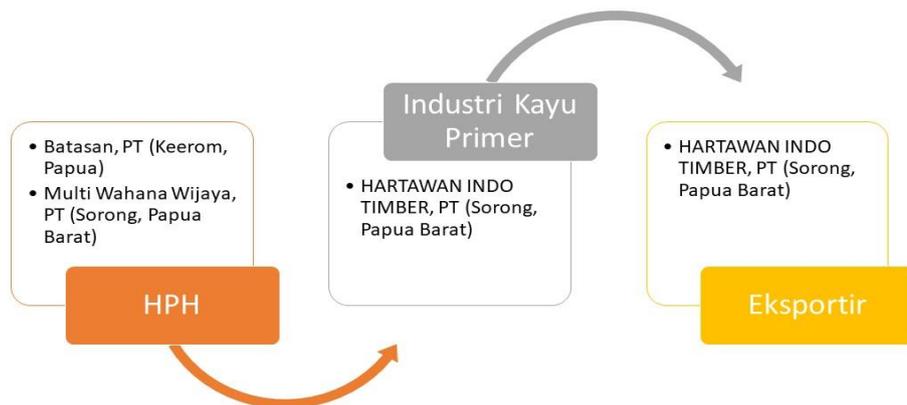
HENRISON IRIANA, PT



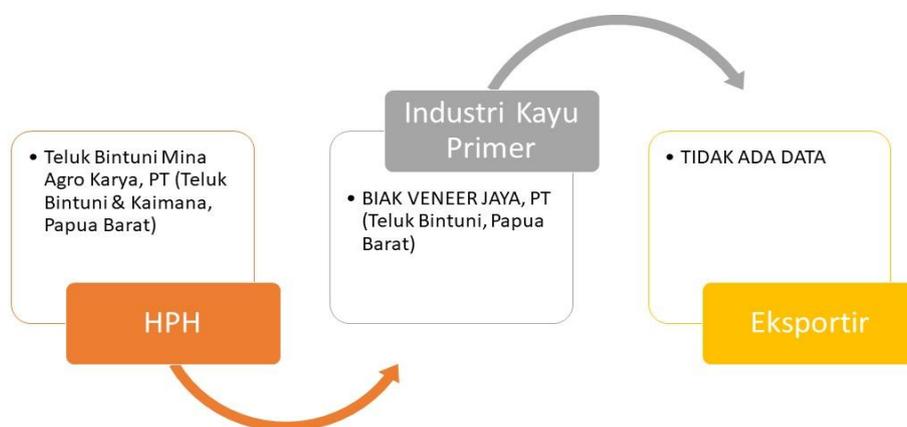
BINTUNI UTAMA MURNI W. INDUSTRIES, PT



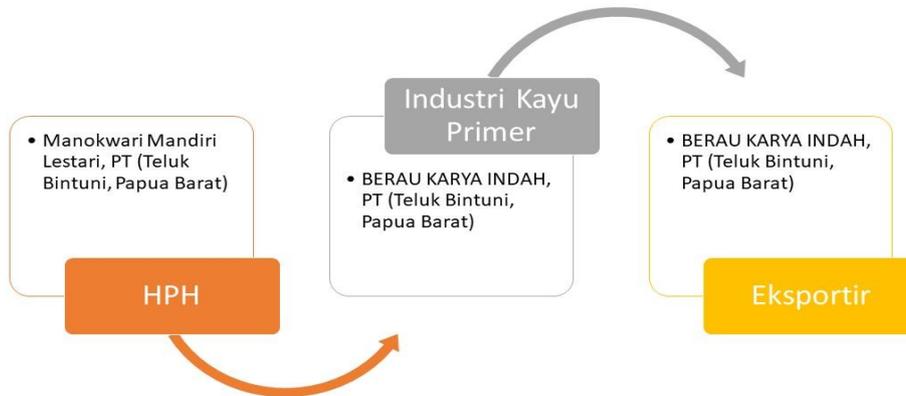
HARTAWAN INDO TIMBER, PT



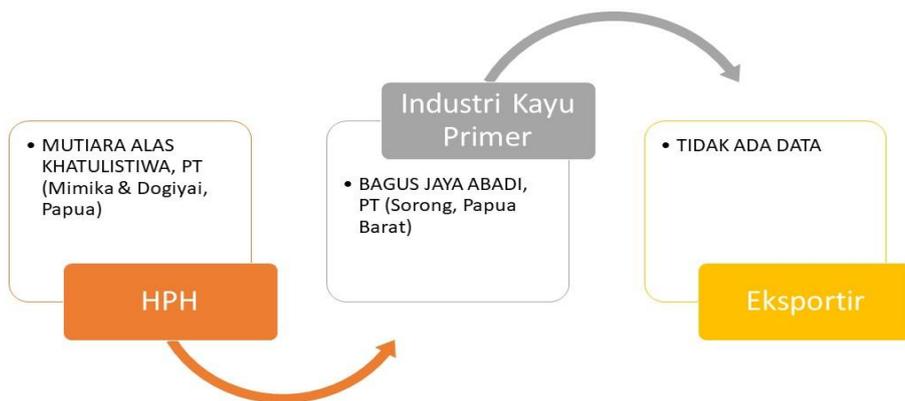
BIAK VENEER JAYA, PT



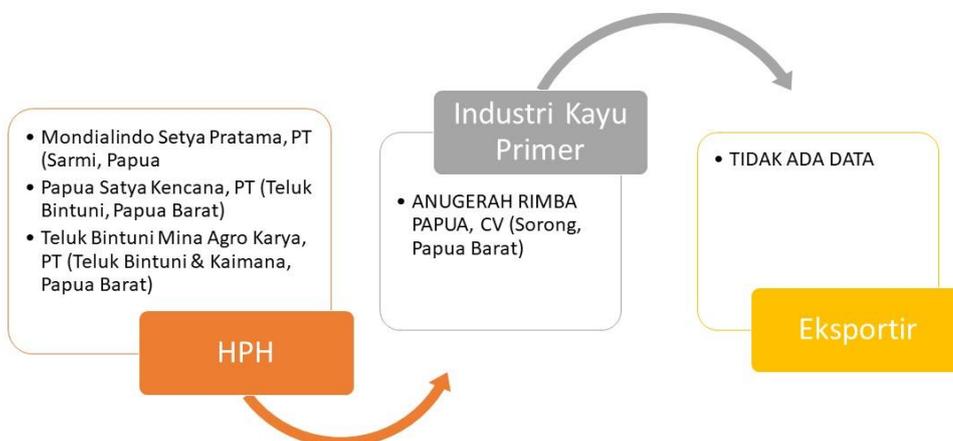
BERAU KARYA INDAH, PT



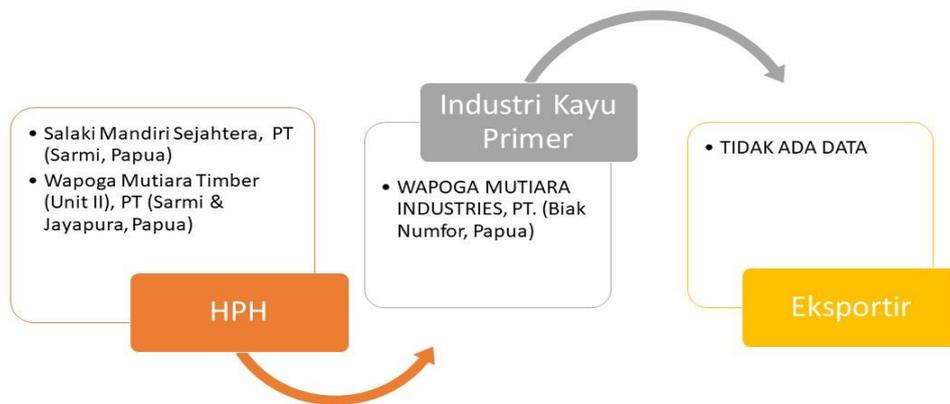
BAGUS JAYA ABADI, PT



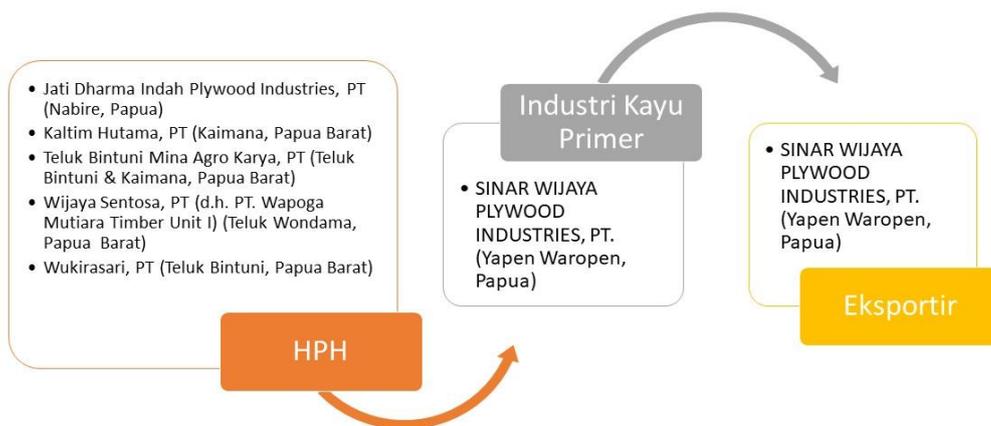
ANUGERAH RIMBA PAPUA, CV



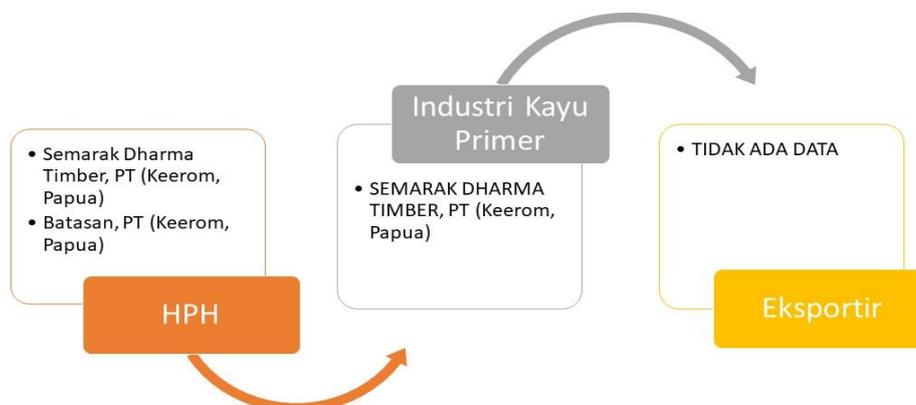
WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES, PT.



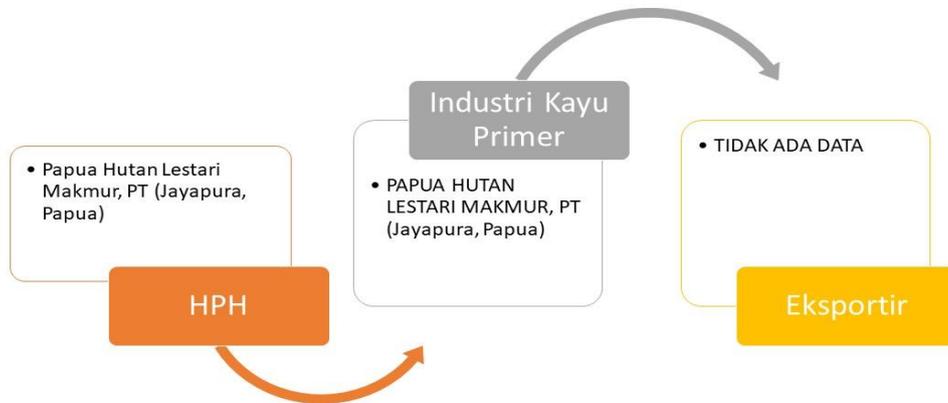
SINAR WIJAYA PLYWOOD INDUSTRIES, PT.



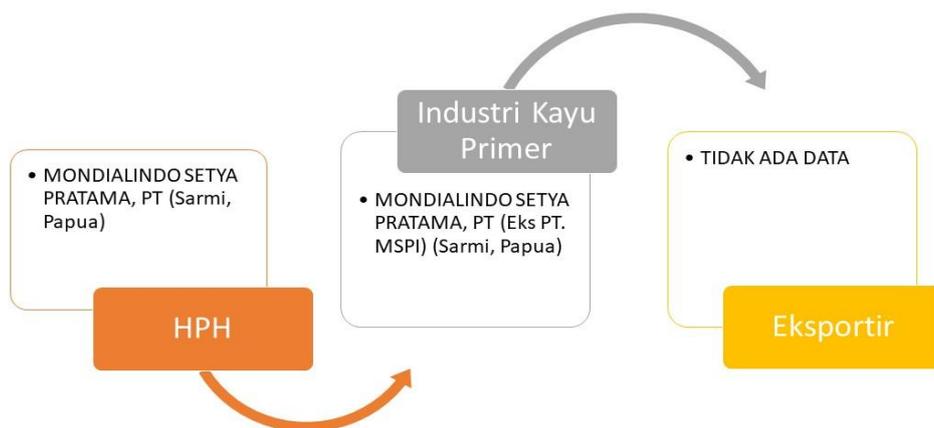
SEMARAK DHARMA TIMBER, PT



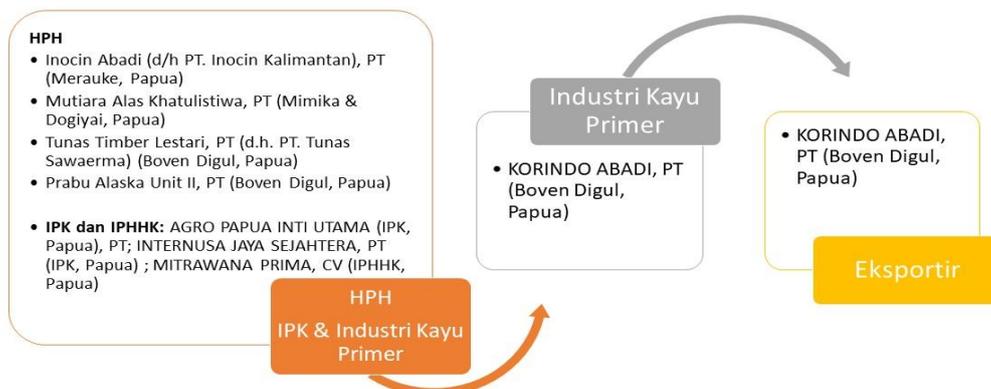
PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR, PT



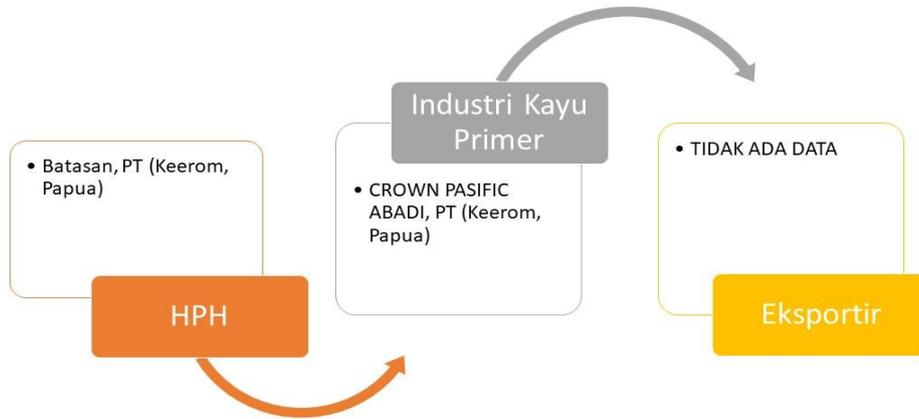
MONDIALINDO SETYA PRATAMA, PT



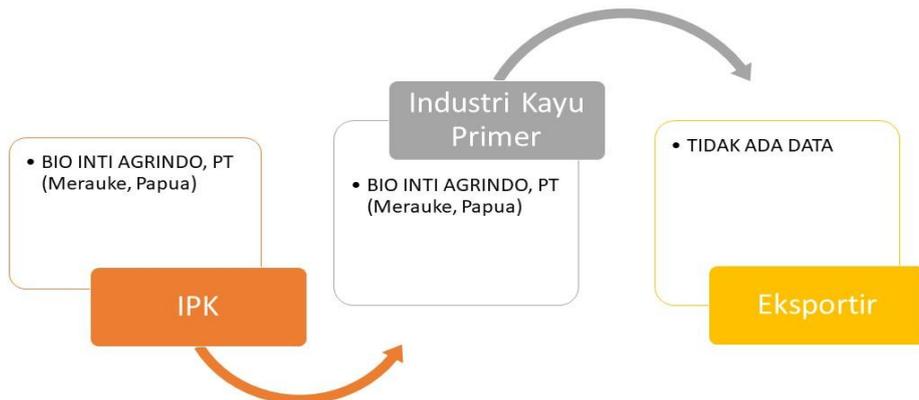
KORINDO ABADI, PT



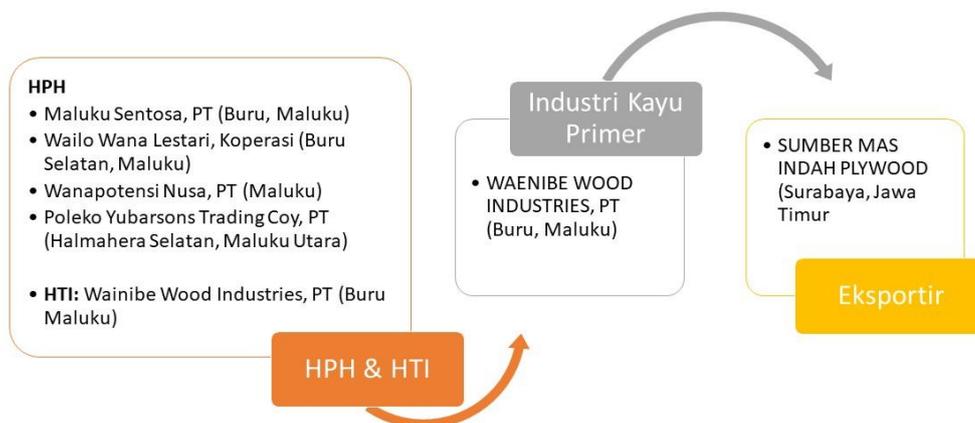
CROWN PASIFIC ABADI, PT



BIO INTI AGRINDO, PT



WAENIBE WOOD INDUSTRIES, PT.



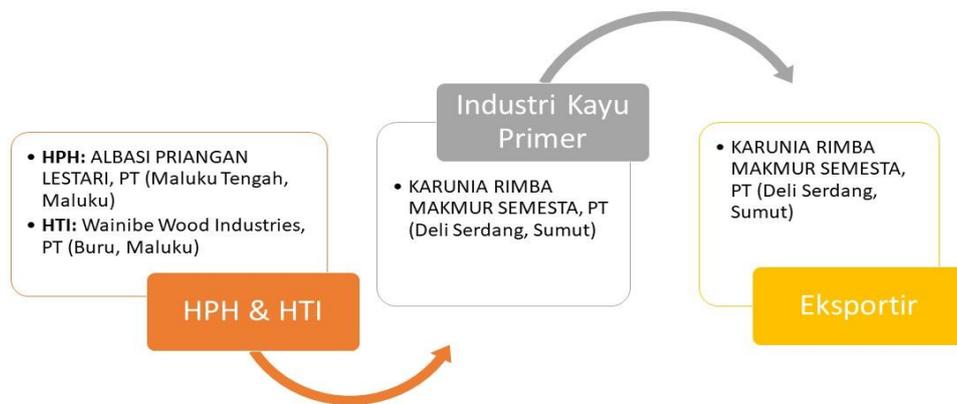
Peredaran Kayu dari Tanah Papua & Kepulauan Maluku

Pada bagian ini akan menyajikan informasi terkait peredaran kayu yang berasal dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku dan diperdagangkan antar pulau. Kayu-kayu yang berasal dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku tersebut dijual kepada industri-industri kayu primer (kapasitas di atas 6000 m²) yang ada di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

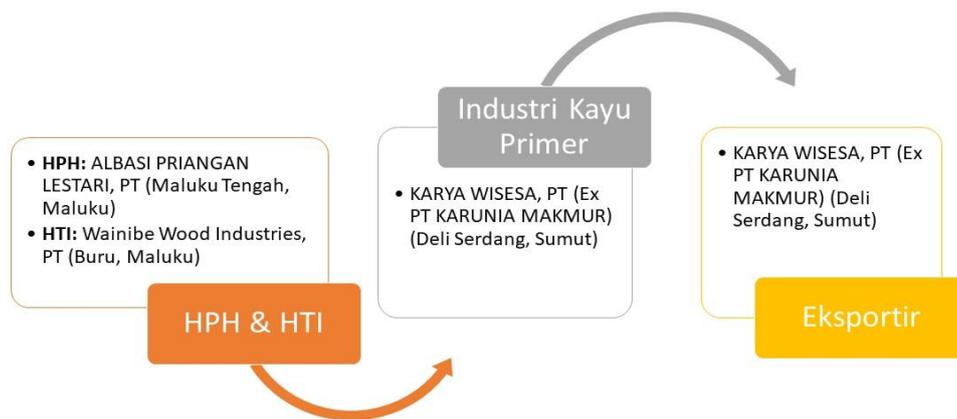
Berdasarkan data yang didapatkan dari RPBBi periode 20018-2019, kayu-kayu yang diperdagangkan bersumber dari perusahaan HPH, HTI, dan sebagian lagi diperoleh dari IPK. Selain itu, ada juga yang bersumber dari hasil perdagangan kayu antar industri. Artinya Industri-industri primer yang berada di luar Tanah Papua dan Kepulauan Maluku ini, menerima kayu dari industri kayu primer yang beroperasi di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku.

Informasi lain yang disajikan terkait nama-nama perusahaan eksportir yang menerima produk kayu dari industri primer yang ada di provinsi-provinsi tersebut untuk dijual ke pasar kayu internasional.

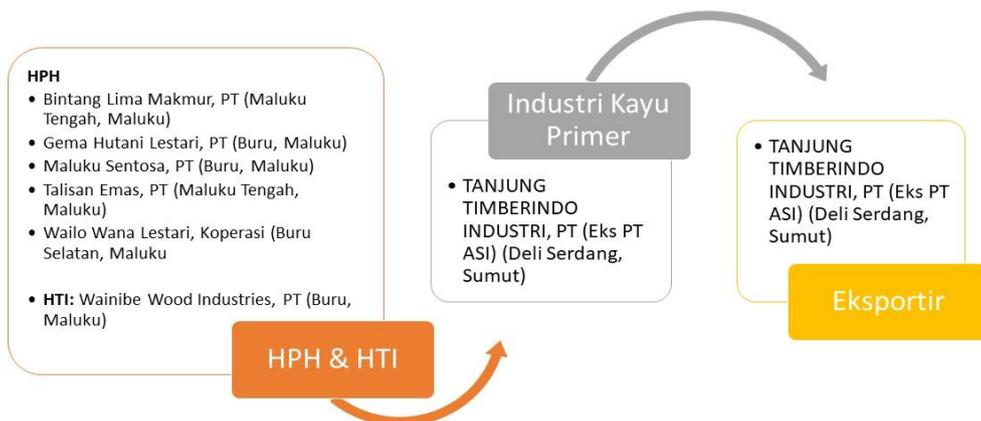
KARUNIA RIMBA MAKMUR SEMESTA, PT



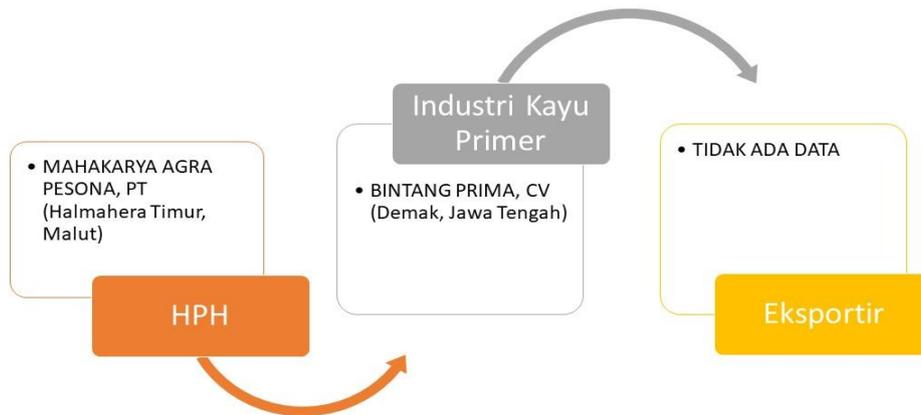
KARYA WISESA, PT (Ex PT KARUNIA MAKMUR)



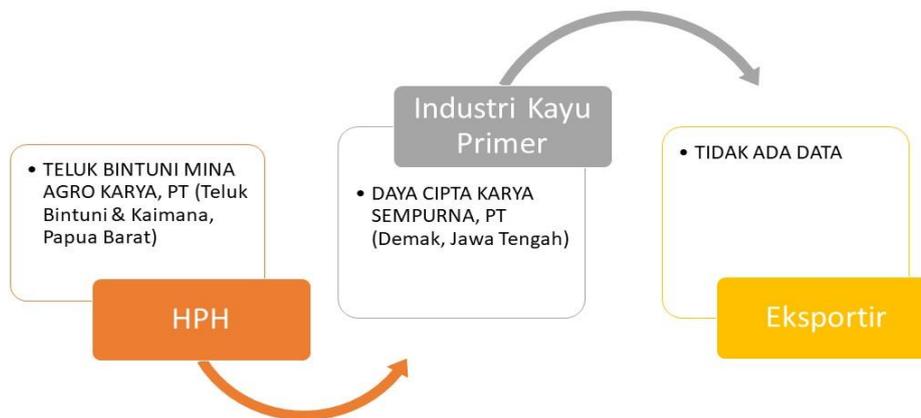
TANJUNG TIMBERINDO INDUSTRI, PT



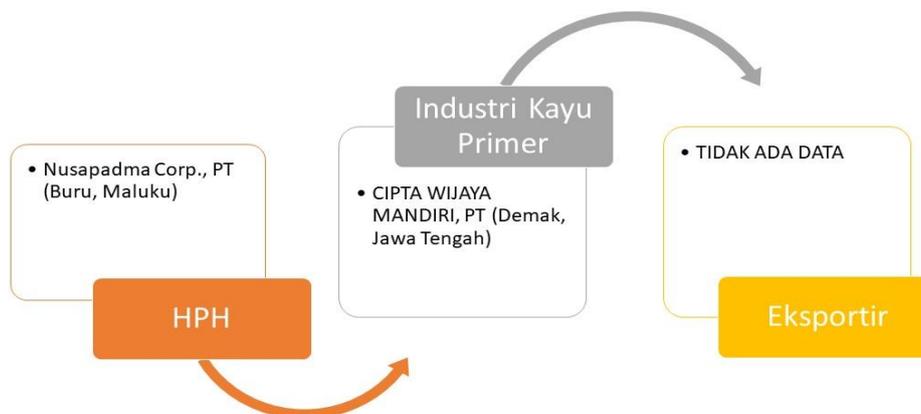
BINTANG PRIMA, CV



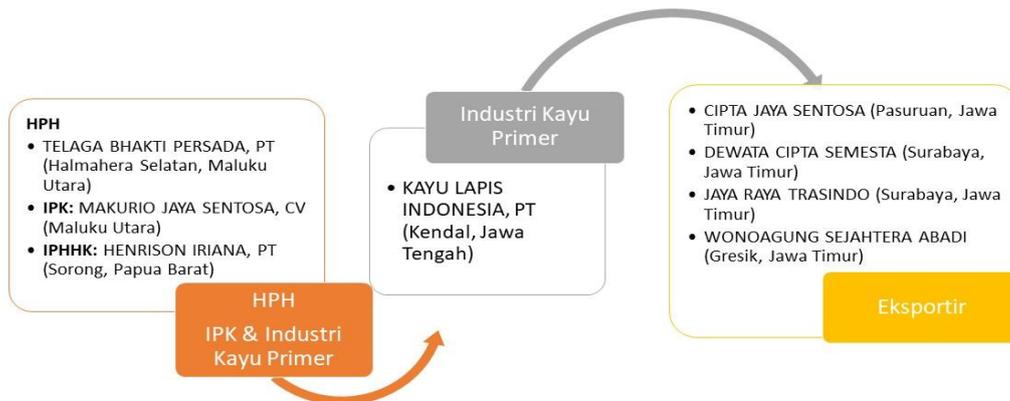
DAYA CIPTA KARYA SEMPURNA, PT



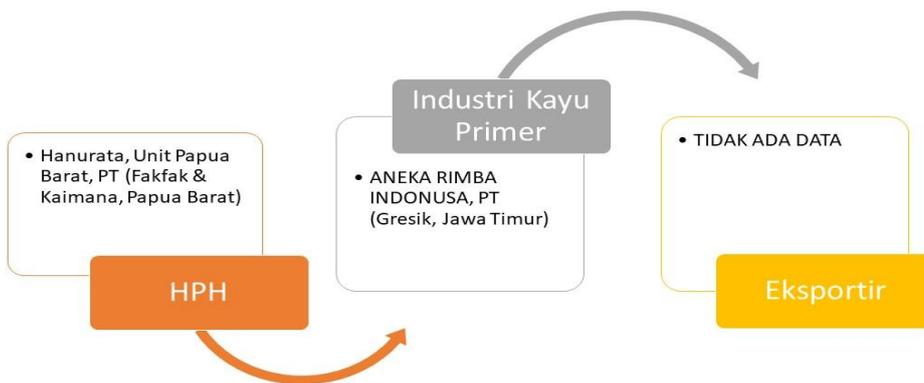
CIPTA WIJAYA MANDIRI, PT



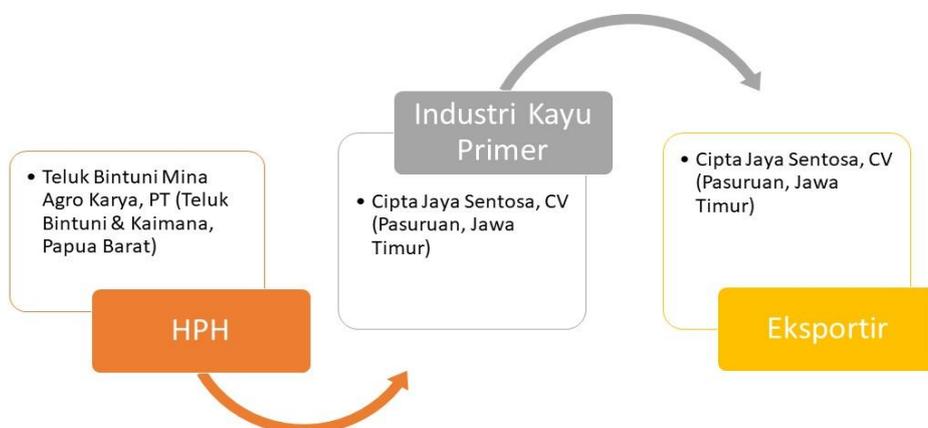
KAYU LAPIS INDONESIA, PT



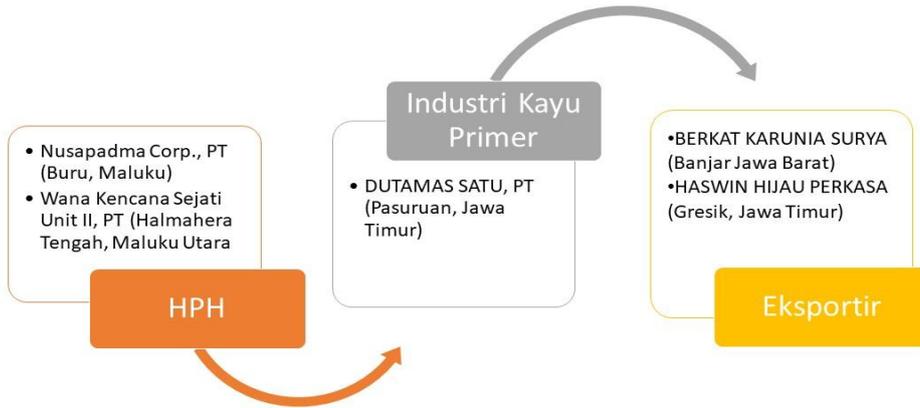
ANEKA RIMBA INDONUSA, PT



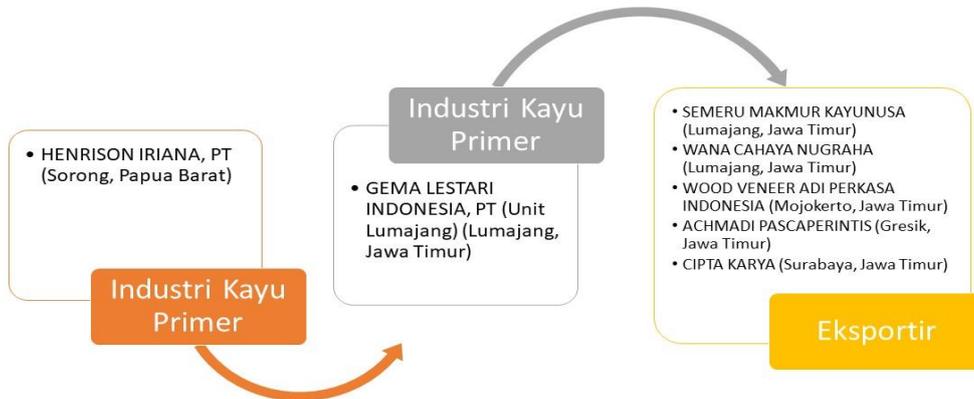
CIPTA JAYA SENTOSA, CV



DUTAMAS SATU, PT



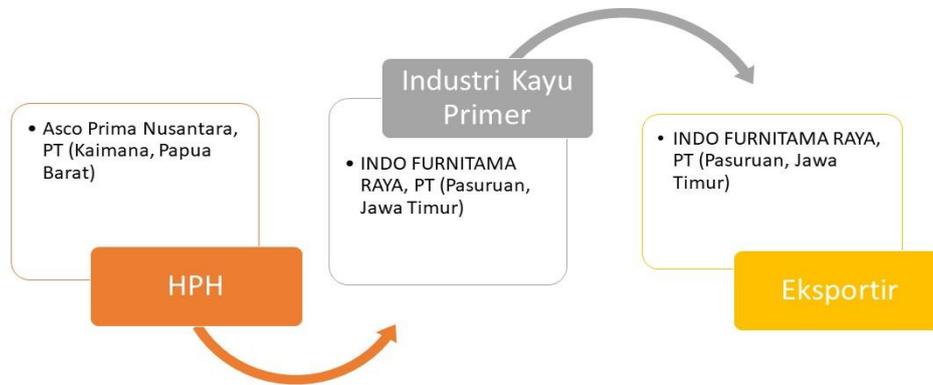
GEMA LESTARI INDONESIA, PT



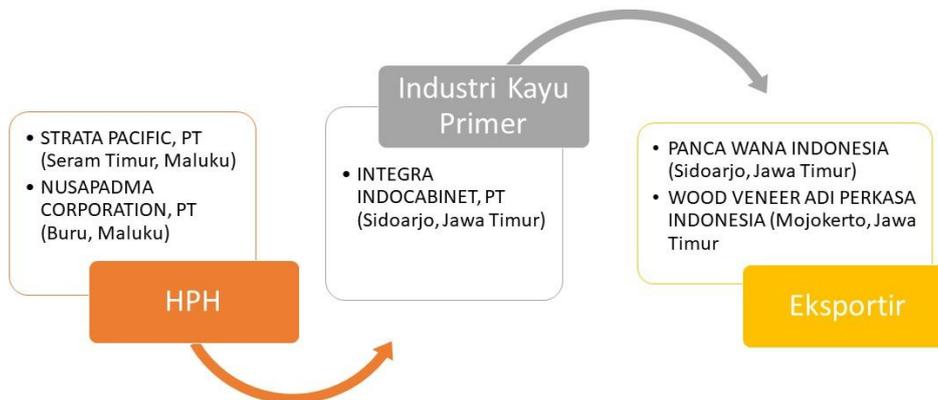
HUTAN LESTARI MUKTI PERKASA, PT



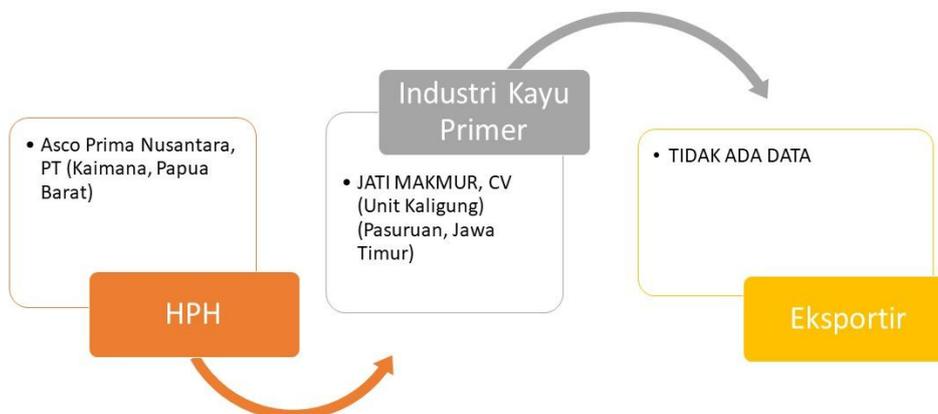
INDO FURNITAMA RAYA, PT



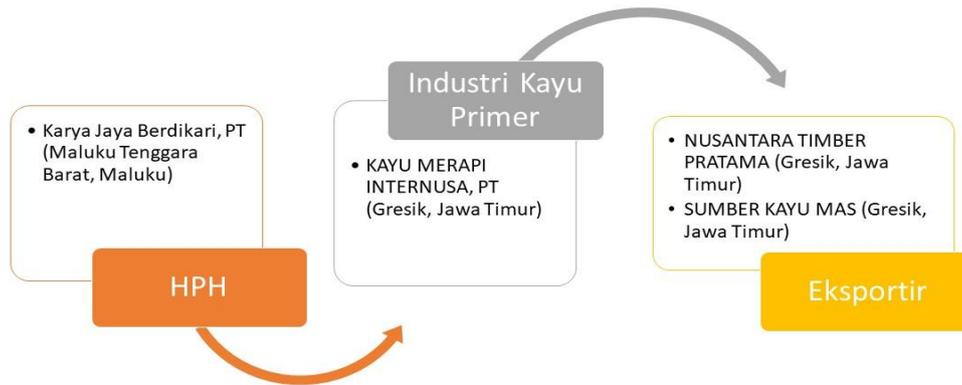
INTEGRA INDOCABINET, PT



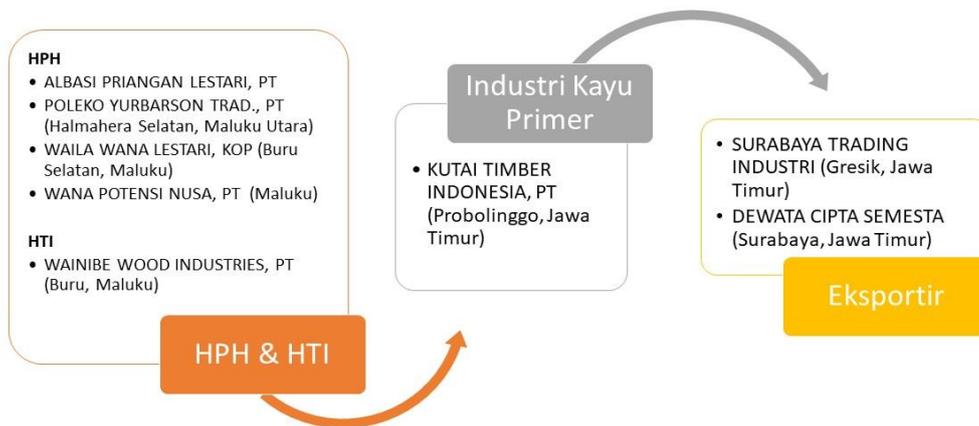
JATI MAKMUR, CV (Unit Kaligung)



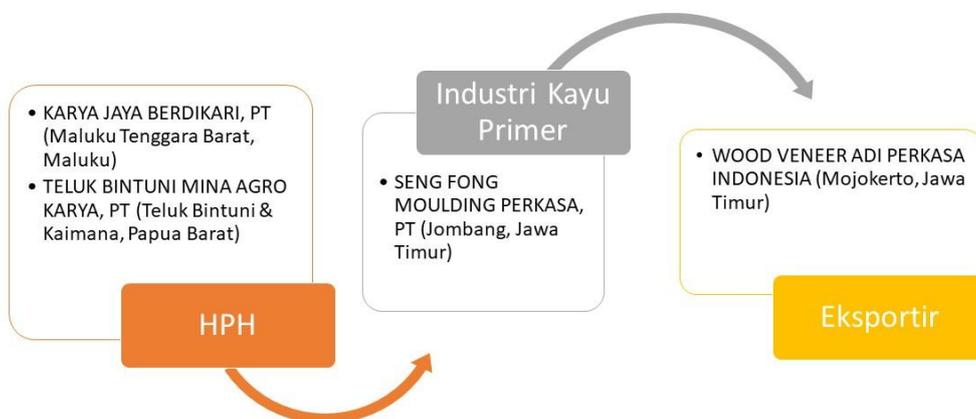
KAYU MERAPI INTERNUSA, PT



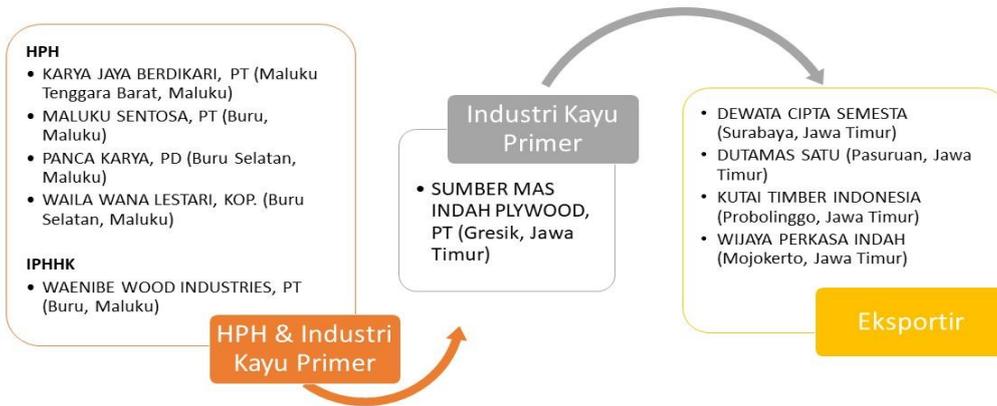
KUTAI TIMBER INDONESIA, PT



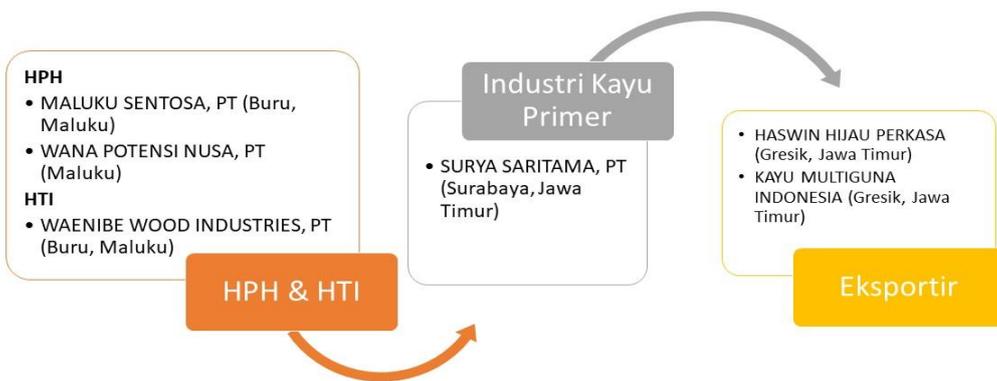
SENG FONG MOULDING PERKASA, PT



SUMBER MAS INDAH PLYWOOD, PT



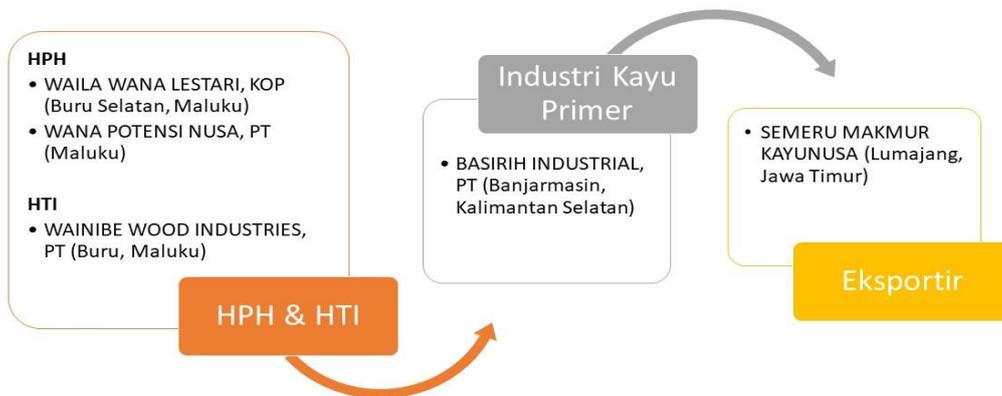
SURYA SARITAMA, PT



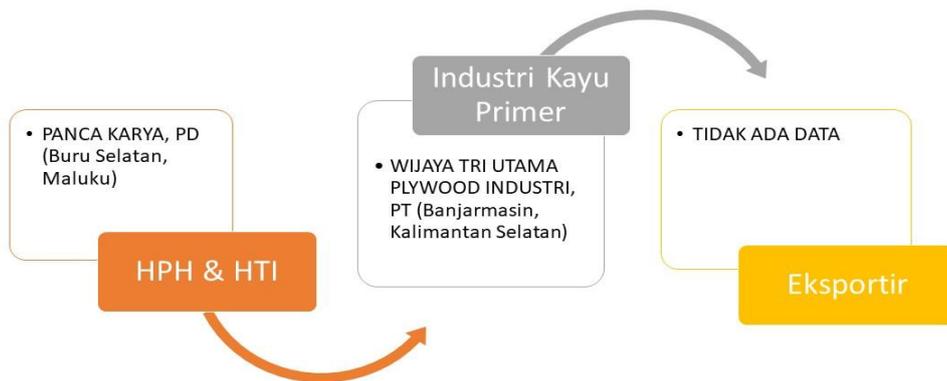
ERNA DJULIAWATI, PT



BASIRIH INDUSTRIAL, PT



WIJAYA TRI UTAMA PLYWOOD INDUSTRI, PT



SLJ GLOBAL Tbk, PT(d/h SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk, PT



KATINGAN TIMBER CELEBES, PT



PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD, PT

